

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengamanatkan tentang kewajiban terpenuhi pangan warganya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Definisi ketahanan pangan (*food security*) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi dimana negara dapat mewujudkan ketersediaan, akses atau keterjangkauan, dan pemanfaatan konsumsi pangan baik pada tingkat nasional hingga perseorangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep ketahanan pangan yang terdiri dari beberapa faktor telah diteliti oleh berbagai pihak seperti pada penelitian Hapsari dan Rudiarto (2017) yang bertujuan mengidentifikasi sebaran ketahanan dan kerawanan pangan desa di Kabupaten Rembang serta menganalisis faktor penyebab ketahanan dan kerawanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan secara umum Kabupaten Rembang berada pada kondisi tahan pangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan dan kerawanan pangan dari hasil pemetaan terbentuk empat kelompok faktor, antara lain faktor ketersediaan pangan, faktor sosial-ekonomi, faktor dampak kesehatan, dan faktor fisik alam. Menurutnya ketahanan dan kerawanan pangan ditentukan oleh keempat kelompok faktor tersebut.

Mun'im (2012) melakukan kajian tentang kondisi ketahanan pangan dengan tujuan mengidentifikasi variabel-variabel yang terdapat dalam faktor ketersediaan, akses, penyerapan, dan ketahanan pangan di kabupaten surplus pangan tahun 2007 serta mengetahui pengaruh faktor ketersediaan, akses dan penyerapan pangan

terhadap ketahanan pangan di kabupaten surplus pangan tahun 2007. Hasil penelitian menyebutkan ketersediaan pangan yang berlebih di kabupaten surplus pangan tidak diiringi dengan akses pangan yang memadai dan penyerapan pangan yang maksimal sehingga di kabupaten yang surplus pangan masih ditemukan adanya kabupaten yang terindikasi rawan pangan dan ketahanan pangan di kabupaten surplus pangan di tahun 2007 lebih dipengaruhi oleh faktor akses pangan daripada faktor penyerapan pangan, sedangkan faktor ketersediaan pangan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap ketahanan pangan. Menurut Mun'im (2012) faktor ketersediaan pangan yang merupakan salah satu faktor ketahanan pangan tidak bermakna terhadap ketahanan pangan suatu wilayah jika tidak diiringi dengan akses pangan yang memadai dan penyerapan pangan yang maksimal.

Simatupang (2016) dalam penelitiannya mencoba menguraikan evolusi perkembangan paradigma ketahanan pangan dan penerapannya dalam perumusan strategi dan kerangka kerja kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Menurutnya strategi swasembada pangan didasarkan pada paradigma ketersediaan pangan (*food availability*) terbukti tidak dapat menjamin akses pangan bagi semua keluarga atau individu yang merupakan inti dari ketahanan pangan. Paradigma yang dipandang lebih tepat ialah perolehan pangan (*food entitlement*) yang mencakup dimensi ketersediaan, akses dan penggunaan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa aspek ketersediaan pangan tidak dapat menjamin akses pangan bagi individu yang merupakan inti ketahanan pangan. Sehingga ketahanan pangan secara umum meliputi ketersediaan pangan dalam jumlah serta jenis yang cukup, akses pangan yang lancar dan merata, dan pemanfaatan atas produk pangan. Ketahanan pangan

tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek, namun perlu adanya sinkronisasi antara keseluruhan aspek ketahanan pangan.

Definisi ketersediaan pangan mengacu pada ketersediaan bahan pangan secara fisik di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam jumlah yang cukup dan yang mungkin dijangkau oleh semua penduduk. Akses pangan mengacu pada kemampuan untuk memperoleh bahan pangan yang telah tersedia tersebut baik melalui media pertukaran (pasar) maupun melalui transfer (institusional). Pemanfaatan pangan mengacu pada proses alokasi dan pengolahan bahan pangan yang telah diakses sehingga setiap individu memperoleh asupan pangan yang cukup dan bergizi. Sehingga ketahanan pangan berdasarkan tiga aspeknya adalah tentang kemampuan suatu wilayah menyediakan ketersediaan pangan, kemampuan warga dalam menjangkau ketersediaan pangan tersebut dan kemampuan dalam pemanfaatan pangan agar mendapat asupan yang bergizi dan seimbang. Dalam realisasi mewujudkan ketahanan pangan masyarakat diharapkan dapat membentuk situasi dimana pemenuhan kebutuhan pangan dapat berjalan secara mandiri.

Tabel 1. Data perkembangan produksi pangan serealialia dan umbi-umbian Kabupaten Bantul tahun 2015-2017.

No	Komoditi (ton)	2015	2016	2017
1	Padi	192.711	198.457	182.980
2	Jagung	22.671	28.933	25.394
3	Ubi Kayu	34.865	29.326	28.903
4	Ubi Jalar	940	2.756	425

Sumber: BPS Kabupaten Bantul dalam angka.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan tabel 1, kondisi ketersediaan pangan Kabupaten Bantul jika dilihat dari produksi pangan serealialia dan umbi-umbian menunjukkan tren menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tren produksi yang menurun ini dikarenakan alih fungsi lahan pertanian khususnya untuk produksi serealialia dan

umbi-umbian di Kabupaten Bantul. Penelitian yang dilakukan oleh Pewista dan Harini (2013) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul adalah harga jual lahan yang tergolong tinggi sehingga menjadi daya tarik bagi pemilik lahan untuk menjual lahan pertaniannya.

Pada kurun waktu yang sama jumlah penduduk Kabupaten Bantul mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Bantul sebanyak 943.521 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 971.511 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 995.264 jiwa. Jika pertumbuhan penduduk terus naik pada tahun selanjutnya dan produksi pangan sereal dan umbi-umbian menurun maka akan terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan pangan warga Kabupaten Bantul dari produksi domestik.

Pada aspek akses pangan Kabupaten Bantul jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk miskin, data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 160.150 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 142.760 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 139.670 jiwa. Hal ini menggambarkan secara umum bahwa penduduk Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2017 mengalami perubahan positif pada tingkat kemiskinan.

Pada aspek pemanfaatan pangan Kabupaten Bantul jika dilihat dari banyaknya balita dengan status gizi buruk menunjukkan tren naik turun untuk kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah balita status gizi buruk di Kabupaten Bantul sebanyak 32 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 34 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 28 jiwa. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari sisi banyaknya balita status gizi buruk aspek pemanfaatan pangan masih belum stabil di Kabupaten Bantul.

Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Bantul dilihat dari ketiga aspek ketahanan pangan masih belum stabil. Ketiga aspek ketahanan pangan menggambarkan tren pertumbuhan yang berbeda. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan (BKPP) Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari tiga kabupaten di DIY yang masih terindikasi rawan pangan (Widuri, 2107).

Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi gambaran mengenai tingkat rawan pangan merupakan hal yang penting. Dalam rangka pengentasan masalah rawan pangan di wilayah Kabupaten Bantul maka perlu diteliti tentang status kondisi suatu wilayah berdasarkan tingkat ketahanan pangan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kondisi kecamatan di Kabupaten Bantul dilihat dari ketiga aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi kondisi ketahanan pangan menurut kecamatan di Kabupaten Bantul berdasarkan indikator ketahanan pangan.
2. Mengelompokkan kecamatan di Kabupaten Bantul berdasarkan indikator ketahanan pangan.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah mengenai tingkat ketahanan pangan kecamatan di Kabupaten Bantul dan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam dasar pembuatan kebijakan terkait masalah kerawanan pangan pada tingkat kecamatan